

ANALISIS OUTPUT DAN OUTCOME BIDANG PENDIDIKAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI JAWA TENGAH

Hanjar Giri Anggraini¹

e-mail: ragil_3tree@yahoo.co.id

Abstract: *This study is aimed to analyze the educational output and outcome in the era of autonomy policy. By using path analysis, this study tested exogenous variables on endogenous variables directly or indirectly. The educational output in this study is the graduation rate of junior secondary school/madrasah tsanawiyah (JSS/MTs), while the educational outcome is the transition rate to general senior secondary school/vocational senior secondary school/madrasah aliyah (GSSS/VSSS/MA). The exogenous variables in this study is the percentage of realization government expenditure in education, gross domestic regional product per capita, ratio of pupils to teacher of JSS/MTs, and ratio of pupils to classes of JSS/MTs. The study found that percentage of realization government expenditure in education had no significant effect on the graduation rate of JSS/MTs and significant effect on the transition rate to GSSS/VSSS/MA. Gross domestic regional product per capita in this study have a significant effect on the graduation rate of JSS/MTs and the transition rate to GSSS/VSSS/MA. The ratio of pupils to teacher of JSS/MTs and the ratio of pupils per classes of JSS/MTs no significant effect either on the graduation rate of JSS/MTs and the transition rate to GSSS/VSSS/MA. As an intervening variable, a variable graduation rate of JSS/MTs was also no significant effect on the transition rate to GSSS/VSSS/MA.*

Keywords: *educational output, aducational outcome, percentage of realization government expenditure in education.*

PENDAHULUAN

Melalui desentralisasi, penyediaan pelayanan pendidikan khususnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah, menjadi bagian dari kewajiban daerah Kabupaten/Kota. Penyerahan kewajiban tersebut disertai pula dengan penyerahan pembiayaan melalui dana perimbangan. Dengan meningkatnya dana yang dikelola

¹ Guru SMA Negeri 2 Batang

daerah, pembangunan kebutuhan dasar manusia pada era desentralisasi menjadi lebih tergantung pada keberhasilan kebijakan pemerintah daerah.

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki fokus dalam pembangunan modal manusia. Penjabaran dari tujuan utama pembangunan di Jawa Tengah ini tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di tiap-tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam APBD di tiap-tiap kabupaten/kota selama tahun 2007-2010 pengeluaran untuk sektor pendidikan menunjukkan persentase yang cukup besar dimana sebagian besar daerah memiliki persentase diatas 20%, bahkan persentase pengeluaran pendidikan tertinggi sebesar 59,08% terjadi di Kabupaten Klaten (DJPK Kementerian Keuangan RI, data diolah.). Namun besarnya realisasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak diimbangi dengan peningkatan *output* pendidikan berupa angka lulusan SMP/MTs. Pencapaian angka lulusan SMP/MTs di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih kecil jika dibandingkan dengan angka lulusan SD/MI dan angka lulusan SMA/SMK/MA, bahkan rata-rata angka lulusan SMP/MTs selama tahun 2007-2010 sebesar 91,50%. Hal ini berarti bahwa angka lulusan belum mencapai 100% (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah).

Peningkatan persentase realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan juga tidak diimbangi dengan peningkatan *outcome* pendidikan berupa angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA dimana rata-rata angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2007-2010 sebesar 80,34%. Hal ini berarti bahwa di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah belum mencapai rasio standar nasional 93,50% (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah). Dengan demikian masih terdapat lulusan jenjang SMP/MTs yang belum memanfaatkan layanan pendidikan menengah.

Penelitian untuk mengukur dampak desentralisasi fiskal terhadap *outcomes* bidang pendidikan dilakukan pula oleh Salinas (2007) di 50 provinsi di Spanyol. Dalam penelitian ini Salinas menggunakan angka melanjutkan pada *secondary school* sebagai indikator *outcomes* bidang pendidikan. Hasil dari penelitiannya adalah terdapat hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal dengan angka melanjutkan pada *secondary school*, dan dampak ini dapat menjadi lebih besar pada daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang diajukan adalah : 1) Bagaimana pengaruh persentase realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap *output* pendidikan berupa angka lulusan SMP/MTs di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2010?, 2) Bagaimana pengaruh persentase realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap *outcome* pendidikan berupa angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007- 2010?, 3) Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap *output* pendidikan berupa angka lulusan SMP/MTS di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2010?, 4) Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap *outcome* pendidikan berupa angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2010?, 5) Bagaimana pengaruh rasio siswa per guru SMP/MTS terhadap *output* pendidikan berupa angka lulusan SMP/MTS di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2010?, 6) Bagaimana pengaruh rasio siswa SMP/MTS per kelas terhadap *output* pendidikan berupa angka lulusan SMP/MTS di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2010?, (7)

Bagaiman pengaruh *output* pendidikan berupa angka lulusan SMP/MTS terhadap *outcome* pendidikan berupa angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2010?

Analisis Output dan Outcome Bidang Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah

Terdapat berbagai pengertian mengenai otonomi yang berkembang di berbagai negara. Mills mendefinisikan desentralisasi atau otonomi daerah sebagai transfer wewenang atau kekuasaan dalam perencanaan publik, manajemen, dan pembuatan keputusan dari level nasional ke level sub nasional atau secara umum dari level pemerintahan yang lebih tinggi ke level pemerintahan yang lebih rendah (dalam Ahmad, 2010). Di Indonesia otonomi daerah dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pada pasal 1 butir 5, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah, yang dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Asas desentralisasi penuh kepada daerah kabupaten dan kota berimplikasi pada penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab (Mardiasmo, 2007).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut Mardiasmo (2009) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pendidikan merupakan salah satu indikator pelayanan publik penting suatu negara. Berhasil atau tidaknya tingkat keberhasilan suatu pemerintahan baik di negara berkembang maupun negara maju dapat dilihat dari indikator pendidikan. Dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik pasal 5 ayat 2, pendidikan merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik. Pengukuran keberhasilan pelayanan pendidikan menggunakan kerangka pengukuran kinerja sektor publik yaitu dengan menggunakan konsep pengukuran *value for money*.

Indikator-indikator kinerja dalam bidang pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Masukan (*Input*). *Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas (Mardiasmo, 2009). Dalam penelitian ini, dari sisi masukan (*input*) dapat dilihat dari indikator pendidikan

yaitu: a) Indikator belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dibagi total belanja pemerintah daerah dan hasilnya dikalikan seratus persen (DF), b) Indikator tingkat pendapatan masyarakat yang kemudian disebut dengan PDRB per kapita (PDRB), c) Rasio Siswa per Guru SMP/MTs (RSG), d) Rasio Siswa SMP/MTs per Kelas (RSK)

Indikator-indikator tersebut di atas, yaitu indikator belanja pemerintah dan PDRB per kapita digunakan oleh Robalino (2001), Uchimura (2009), dan Rubio (2010). Salinas (2007) dalam penelitiannya menggunakan indikator belanja pemerintah, PDRB per kapita, dan rasio siswa per guru. Sedangkan Wei-qing (2010) dan Akpan (2011) menggunakan indikator belanja pemerintah dalam penelitiannya.

2. Keluaran (*Output*). *Output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Mengukur *output* lebih sulit dilakukan terutama untuk pelayanan sosial, seperti pendidikan, keamanan, atau kesehatan (Mardiasmo, 2009). *Output* adalah keluaran yang bisa dikendalikan dari dalam institusi, seperti dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator pendidikan yaitu angka lulusan SMP/MTs (AL).
3. Dampak (*Outcome*). *Outcome* adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. *Outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai (Mardiasmo, 2009). *Outcome* dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator pendidikan yaitu angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM). Indikator angka melanjutkan tersebut digunakan juga oleh Salinas (2007) dalam penelitiannya.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini yaitu persentase realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan (DF), PDRB per kapita (PDRB), rasio siswa per guru SMP/MTs (RSG), dan rasio siswa SMP/MTs per kelas (RSK). Variabel endogen terdiri dari angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM), sedangkan variabel intervening adalah angka lulusan SMP/MTs (AL). Persentase realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan (DF) didefinisikan sebagai belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dibagi total belanja pemerintah daerah dan hasilnya dikalikan seratus persen. PDRB per kapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Rasio siswa per guru adalah jumlah siswa jenjang pendidikan SMP/MTs dibagi jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Rasio siswa per kelas adalah jumlah siswa jenjang pendidikan SMP/MTs dibagi dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Angka lulusan SMP/MTs adalah jumlah lulusan SMP/MTs dibagi jumlah siswa kelas IX (kelas 3 SMP/MTs) tahun sebelumnya kemudian dikalikan seratus persen. Angka melanjutkan ke SMA/MA/SMK adalah jumlah siswa baru kelas X (kelas 1 SMA/MA/SMK) dibagi jumlah lulusan SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya kemudian hasilnya dikalikan seratus persen (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk data panel (pooled data). Data pool yaitu kombinasi data runtut waktu dan data *cross section* (Gujarati, 2010). Data panel dalam penelitian ini merupakan gabungan data *time series* dari tahun 2007-2010, dan data *cross section* yang terdiri atas 35 Kabupaten/Kota.

Untuk menganalisa *output* dan *outcome* bidang pendidikan dalam era otonomi daerah, penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk menguji secara langsung maupun tidak langsung antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. *Output* bidang pendidikan dalam penelitian ini adalah angka lulusan SMP/MTs, sedangkan *outcome* bidang pendidikan adalah angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA. Analisis pengaruh langsung dilakukan untuk menguji antara variabel eksogen (persentase realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan, PDRB per kapita, rasio siswa per guru SMP/MTs, dan rasio siswa SMP/MTs per kelas) terhadap variabel angka lulusan SMP/MTs. Adapun analisis pengaruh tidak langsung digunakan untuk melihat pengaruh variabel eksogen melalui variabel angka lulusan SMP/MTs sebagai variabel intervening atau mediator dalam mempengaruhi variabel endogen (angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA). Model analisis jalur dapat ditulis dengan persamaan struktural sebagai berikut.

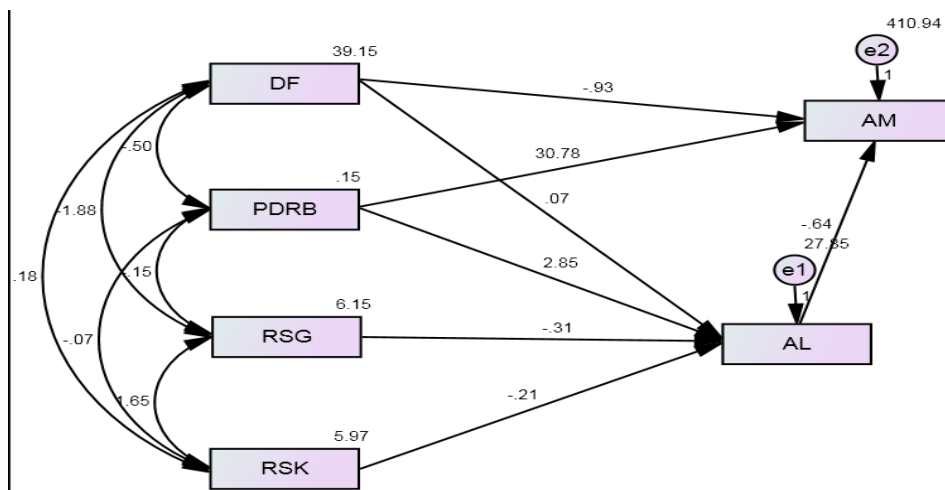
$$AL = \beta_1 DF + \beta_2 PDRB + \beta_3 RSG + \beta_4 RSK + \varepsilon_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$AM = \lambda_1 DF + \lambda_2 PDRB + \lambda_3 AL + \varepsilon_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| DF : persentase realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan di tiap Kabupaten/Kota. | RSG : rasio siswa per guru SMP/MTs |
| PDRB : melambangkan PDRB per kapita berdasarkan harga yang berlaku | RSK : rasio siswa SMP/MTs per kelas |
| | AL : angka lulusan SMP/MTs |
| | AM : angka melanjutkan ke MA |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Diagram Analisis Jalur

Berdasarkan diagram jalur pada Gambar 1, maka dapat disusun persamaan struktural dari model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini. Persamaan struktural hasil olahan data dengan menggunakan Amos versi 20 dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$AL = 0,074DF + 2,849PDRB - 0,309RSG - 0,206RSK \dots\dots\dots(1)$$

$$AM = -0,935DF + 30,78PDRB - 0,644AL \dots\dots\dots(2)$$

Hasil perhitungan dengan Amos versi 20 akan menampilkan hasil pengujian hipotesis yang ringkasannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Pengujian Hipotesis

Variabel Eksogen	AL		AM	
	Parameter	ρ value	Parameter	ρ value
DF	0.074	0.361	-0.935	0.003
PDRB	2.849	0.032	30.78	0.000
RSG	-0.309	0.142	-	-
RSK	-0.206	0.327	-	-
AL	-0.644	0.067	-0.644	0.067
R2		0,089		0,329

Berdasarkan tabel 2 dapat diuraikan beberapa temuan penelitian terkait dengan pengujian hipotesis. Variabel persentase realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan (DF) tidak berpengaruh signifikan terhadap angka lulusan SMP/MTs (AL), tetapi berpengaruh signifikan terhadap angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM). Terhadap angka lulusan SMP/MTs (AL) dapat diketahui bahwa ρ value variabel persentase realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan (DF) adalah sebesar 0,361 atau lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Kondisi yang berbeda terjadi pada pengaruh persentase realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan (DF) terhadap angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM), dimana ρ value yang didapatkan (0,003) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$.

Variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap angka lulusan SMP/MTs (AL) dan angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM). Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa ρ value pengaruh PDRB terhadap AL adalah sebesar 0,032 sedangkan terhadap AM adalah sebesar 0.000 atau keduanya lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Variabel rasio siswa per guru SMP/MTs (RSG) dan rasio siswa SMP/MTs per kelas (RSK) tidak berpengaruh signifikan terhadap angka lulusan SMP/MTs (AL). Hal ini dapat dilihat dari ρ value pengaruh RSG terhadap AL adalah sebesar 0,142 dan ρ value pengaruh RSK terhadap AL adalah sebesar 0,327 yang mana keduanya lebih besar dari $\alpha = 5\%$.

Variabel angka lulusan SMP/MTs (AL) tidak berpengaruh signifikan terhadap angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM). Dengan ρ value sebesar 0,067 atau lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Berdasarkan tabel 2 juga dapat diketahui bahwa nilai R^2 untuk masing-masing persamaan struktural yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai R^2 untuk persamaan struktural (1) adalah sebesar 0,089, artinya adalah model dalam persamaan mampu dijelaskan oleh variabel eksogen sebesar 8,9 persen dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model. Adapun nilai R^2 untuk persamaan struktural (2) adalah sebesar 0,329, artinya adalah model dalam persamaan mampu dijelaskan oleh variabel eksogen sebesar 32,9 persen dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

Nilai R^2 yang besar memang diharapkan dan model yang digunakan dapat dikatakan baik, tetapi dengan nilai R^2 yang kecil bukan berarti bahwa model yang digunakan adalah buruk (Gujarati dan Porter, 2009). Nilai R^2 yang kecil tersebut juga terjadi pada kedua persamaan struktural yang digunakan dalam penelitian ini, secara berturut-turut nilai R^2 dari kedua persamaan tersebut adalah sebesar 0,089 dan 0,329.

Pengaruh Persentase Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Angka Lulusan SMP/MTs

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan antara persentase realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan (DF) dengan angka lulusan SMP/MTs (AL) disebabkan karena selama periode penelitian tahun 2007-2010 terjadi perubahan terhadap norma kelulusan Ujian Nasional yang dituangkan dalam POS UN Tahun Pelajaran 2007/2008 yang disahkan pada tanggal 27 November 2007. Dalam Ujian Nasional sejak tahun 2008 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs terdapat mapel baru/tambahan yang diujikan yaitu mapel IPA, sehingga pada UN 2008 mapel yang diujikan bertambah menjadi 4 mapel (Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA). Kebijakan UN yang baru ini berdampak pada menurunnya angka lulusan SMP/MTs hampir di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Turunnya angka lulusan SMP/MTs pada periode penelitian tahun 2007-2010 juga disebabkan karena peserta UN SMP/MTs menghadapi SKL UN interseksi dari Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hal tersebut menjadi beban berat bagi peserta UN di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Disatu sisi tidak ada program-program pembiayaan pemerintah yang khusus ditujukan untuk meningkatkan angka lulusan SMP/MTs seperti program bedah SKL mapel UN SMP/MTs yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pelatihan guru mapel yang diujikan nasional untuk jenjang SMP/MTs. Menurut data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah baru pada tahun 2010 mulai diselenggarakan program pelatihan guru mapel yang diujikan nasional yang diikuti sebanyak 1.820 guru mapel Bahasa Indonesia, 1.545 guru mapel Bahasa Inggris, 2.015 guru mapel Matematika, dan 1.946 guru mapel IPA (Profil Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2010).

Pengaruh Persentase Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA

Realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA dengan pengaruh hubungan yang negatif. Hal tersebut cukup berbeda dengan teori dan penelitian yang dilakukan oleh Salinas (2007) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap angka melanjutkan (*survival rate*) ke SLTP. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan karena ukuran yang digunakan untuk menghitung persentase realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan dan angka melanjutkan berbeda dengan ukuran yang digunakan oleh Salinas dalam penelitiannya.

Keberadaan meningkatnya persentase realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan (DF) belum memberikan hasil yang baik karena angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM) turun seiring dengan kenaikan persentase realisasi belanja pemerintah, hal ini disebabkan karena selama periode penelitian tahun 2007-2010 belum ada program-program pembiayaan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA, seperti bantuan operasional sekolah (BOS). Tidak adanya BOS menyebabkan mahalnya biaya pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA yang harus ditanggung oleh peserta didik. Selain tidak adanya bantuan operasional sekolah, realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan lebih banyak diprioritaskan untuk jenjang sekolah dasar (SD/MI). Rata-rata belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan selama tahun 2007-2010 untuk jenjang SD/MI di Jawa Tengah sebesar 89,99% (Rp 1.269.300.964.329.400,00),

untuk SMP/MTs sebesar 9,26% (Rp 184.132.534.603.575,00), dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 0,75% (Rp 18.631.915.824.304,70) (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2007-2010). Rendahnya belanja pemerintah bidang pendidikan untuk jenjang SMA/SMK/MA ini menyebabkan biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik masih relatif tinggi. Mahalnya biaya pendidikan ini berdampak pada angka melanjutkan ke SMA/MA/SMK (AM) di beberapa kabupaten/kota selama tahun 2007-2010 belum mencapai standar nasional yaitu 93,50%, bahkan angka melanjutkan ini mengalami penurunan pada 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran keluarga akan pendidikan putra/putrinya, keinginan dari si peserta didik, dan pengaruh lingkungan setempat, yang dalam penelitian ini tidak ikut diteliti.

Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Angka Lulusan SMP/MTs

Penelitian ini menemukan bahwa PDRB per kapita (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka lulusan SMP/MTs (AL). Sebagai salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat, PDRB per kapita mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan PDRB per kapita akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami peningkatan yaitu kebutuhan akan pendidikan. Dengan kata lain, peningkatan PDRB per kapita akan meningkatkan kebutuhan akan pendidikan untuk terus belajar hingga dapat lulus sekolah sehingga akan terjadi pula peningkatan angka lulusan SMP/MTs (AL).

Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA

Selain berpengaruh signifikan terhadap angka lulusan SMP/MTs (AL), PDRB perkapita (PDRB) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM). Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien dari pengaruh PDRB perkapita (PDRB) terhadap angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM) yaitu sebesar 30,78 dengan p value sebesar 0.000 atau lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Dengan kata lain apabila terjadi peningkatan PDRB perkapita (PDRB) sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM) sebesar 30,78 persen.

Berpengaruh negatif antara variabel realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan (DF) terhadap angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM) mengindikasikan bahwa angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM) lebih dominan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perekonomian masyarakat. Peningkatan PDRB perkapita (PDRB) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat juga akan mengindikasikan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhinya termasuk kebutuhan akan pendidikan. Oleh karena itu, dengan peningkatan PDRB per kapita (PDRB) masyarakat akan memiliki kemampuan lebih untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Apalagi biaya melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) pada periode penelitian sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat.

Pengaruh Rasio Siswa Per Guru dan Rasio Siswa Per Kelas terhadap Angka Lulusan SMP/MTs

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik rasio siswa per guru (RSG) maupun rasio siswa per kelas (RSK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Angka Lulusan SMP/MTs (AL). Kondisi rasio siswa per guru SMP/MTs (RSG) tidak hanya dipandang dari segi kuantitas semata dengan tercapainya rasio standar nasional 20:1, namun perlu juga dilihat dari segi kualitas yaitu melihat kondisi kelayakan mengajar maupun pelatihan yang pernah diikutinya. Tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan antara rasio siswa per guru (RSG) dengan angka lulusan SMP/MTs (AL) disebabkan karena selama periode penelitian tahun 2007-2010 dari jumlah guru yang tersedia untuk melayani siswa SMP/MTs terdapat kondisi guru dalam keadaan tidak layak mengajar dan sedikitnya jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan. Dari seluruh jumlah guru SMP/MTs di Jawa Tengah pada tahun 2007 sebesar 100.602 guru terdapat sebesar 39.559 guru (39,32%) dalam kondisi tidak layak mengajar, pada tahun 2008 dari 100.194 guru terdapat sebesar 36.279 guru (36,21%) dalam kondisi tidak layak mengajar, pada tahun 2009 dari 100.989 guru terdapat sebesar 37.936 guru (37,56%) dalam kondisi tidak layak mengajar, dan pada tahun 2010 dari 100.936 guru terdapat sebesar 20.027 guru (19,84%) dalam kondisi tidak layak mengajar (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2007-2010). Masih banyaknya jumlah guru dalam kondisi tidak layak mengajar ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan dalam hal ini angka lulusan SMP/MTs (AL) pada periode penelitian, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa rasio siswa per guru (RSG) dalam kondisi baik/sesuai standar nasional.

Tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan antara rasio siswa per guru (RSG) dengan angka lulusan SMP/MTs (AL) disebabkan karena selama periode penelitian tahun 2007-2010 guru yang telah mengikuti pelatihan sedikit jumlahnya. Menurut data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang pelatihan guru mapel yang menunjang Ujian Nasional selama periode penelitian tahun 2007-2010, tercatat bahwa hanya pada tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah telah diselenggarakan pelatihan guru mapel Ujian Nasional SMP/MTs yaitu dari 10.105 guru Bahasa Indonesia yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 1.820 guru, dari 9.600 guru Bahasa Inggris yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 1.545 guru, dari 10.493 guru Matematika yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 2.015 guru, dan dari 12.070 guru IPA yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 1.946 guru (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2010). Masih kecilnya jumlah guru yang mengikuti pelatihan pada periode penelitian ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan dalam hal ini menurunnya angka lulusan SMP/MTs (AL).

Kondisi rasio siswa SMP/MTs per kelas (RSK) tidak hanya dipandang dari segi kuantitas semata dengan tercapainya rasio standar nasional 32:1, namun perlu juga dilihat dari segi kualitas yaitu melihat kondisi ruang kelas maupun fasilitas ruang Laboratorium yang menunjang proses pembelajaran. Tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan antara rasio siswa SMP/MTs per kelas (RSK) dengan angka lulusan SMP/MTs (AL) disebabkan karena selama periode penelitian tahun 2007-2010 terjadi kondisi dimana rasio siswa SMP/MTs per kelas (RSK) tidak mencapai standar nasional 32:1, terdapat kondisi ruang kelas rusak, dan fasilitas ruang laboratorium yang terbatas. Selama periode penelitian hampir di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

belum mencapai standar nasional untuk rasio siswa per kelas (RSG) yaitu satu kelas dengan daya tampung maksimal 32 siswa. Masih tingginya rasio ini dapat mengganggu kualitas layanan pendidikan sehingga angka lulusan SMP/MTs (AL) tidak tercapai secara maksimal.

Dilihat dari kondisi ruang kelas pada tahun 2007 di Jawa Tengah terdapat 4.150 SMP/MTs, dari jumlah 4.150 sekolah terdapat jumlah kelas sebanyak 43.739, dari jumlah kelas ini terdapat 7.081 ruang kelas yang rusak. Pada tahun 2008 di Jawa Tengah terdapat 4.296 SMP/MTs, dari jumlah 4.296 sekolah terdapat jumlah kelas sebanyak 42.452, dari jumlah kelas ini terdapat 7.583 ruang kelas yang rusak. Pada tahun 2009 di Jawa Tengah terdapat 4.319 SMP/MTs, dari jumlah 4.319 sekolah terdapat jumlah kelas sebanyak 43.127, dari jumlah kelas ini terdapat 6.997 ruang kelas yang rusak. Pada tahun 2010 di Jawa Tengah terdapat 4.525 SMP/MTs, dari jumlah 4.525 sekolah terdapat jumlah kelas sebanyak 45.835, dari jumlah kelas ini terdapat 6.845 ruang kelas yang rusak (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2007-2010). Masih banyaknya ruang kelas yang rusak ini dapat mengganggu kualitas layanan pendidikan sehingga angka lulusan SMP/MTs (AL) tidak tercapai secara maksimal.

Dilihat dari fasilitas ruang laboratorium yang dimiliki di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2007-2010 disajikan jumlah sekolah dan jumlah ruang laboratorium berturut-turut sebagai berikut: tahun 2007 jumlah sekolah 4.150 jumlah laboratorium yang dimiliki 4.407, tahun 2008 jumlah sekolah 4.296 jumlah laboratorium yang dimiliki 4.180, tahun 2009 jumlah sekolah 4.319 jumlah laboratorium yang dimiliki 4.080, dan tahun 2010 jumlah sekolah 4.525 jumlah laboratorium yang dimiliki 2.152. Dari data tersebut tampak bahwa jumlah laboratorium yang dimiliki masih sangat terbatas karena jumlah laboratorium yang seharusnya adalah 2 x jumlah sekolah jika itu mengacu pada mapel Ujian Nasional yang diujikan, sebagai contoh pada tahun 2007 jumlah laboratorium yang seharusnya dimiliki adalah $2 \times 4.150 = 8.300$ artinya tiap sekolah minimal harus memiliki 2 laboratorium yaitu laboratorium Bahasa dan laboratorium IPA. Dengan masih terbatasnya jumlah ruang Laboratorium yang dimiliki dapat mengganggu kualitas layanan pendidikan sehingga angka lulusan SMP/MTs (AL) tidak tercapai secara maksimal.

Pengaruh Angka Lulusan SMP/MTs terhadap Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA

Dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel angka lulusan SMP/MTs (AL) tidak berpengaruh signifikan terhadap angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM), hal ini dapat terjadi mengingat tidak semua siswa yang lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi selama periode penelitian biaya pendidikan sebagian besar harus ditanggung oleh peserta didik sehingga hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah belum mencapai standar nasional untuk angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA dan hampir di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA mengalami penurunan. Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA sangat dipengaruhi oleh kesadaran keluarga akan pendidikan putra/putrinya, keinginan dari si peserta didik, dan pengaruh lingkungan setempat, yang dalam penelitian ini juga tidak ikut diteliti.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1). Persentase realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan (DF) tidak berpengaruh signifikan terhadap *output* pendidikan berupa angka lulusan SMP/MTs (AL). 2). Persentase realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan (DF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *outcome* pendidikan berupa angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM). 3). PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap *output* pendidikan angka lulusan SMP/MTs (AL). 4). PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap *outcome* pendidikan berupa angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM). 5). Rasio siswa per guru SMP/MTs (RSG) tidak berpengaruh signifikan terhadap *output* pendidikan berupa angka lulusan SMP/MTs (AL). 6). Rasio siswa SMP/MTs per kelas (RSK) tidak berpengaruh signifikan terhadap *output* pendidikan berupa angka lulusan SMP/MTs (AL). 7). Angka lulusan SMP/MTs (AL) tidak berpengaruh signifikan terhadap angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (AM) artinya *output* pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *outcome* pendidikan.

Sedangkan saran yang diajukan yaitu: a). Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pembiayaan untuk program-program yang khusus meningkatkan angka lulusan SMP/MTs, seperti program pelatihan guru mapel yang diujikan nasional. b). Pemerintah perlu mengoptimalkan program-program pembiayaan pada jenjang sekolah menengah (SMA/SMK/MA), seperti BOS untuk SMA/SMK/MA agar biaya pendidikan dapat terjangkau dan murah sehingga lulusan SMP/MTs mampu melanjutkan ke SMA/SMK/MA. c). Pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui PDRB per kapita dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan kesempatan kerja seluas-luasnya, sehingga angka lulusan SMP/MTs bisa mencapai hasil maksimal yaitu lulus 100% dan angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA dapat mencapai standar nasional sebesar 93,50%. d). Pemerintah harus memperhatikan rasio siswa per guru SMP/MTs dari segi kualitas yaitu kondisi kelayakan mengajar harus ditingkatkan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan (guru harus S1 keguruan) dan pelatihan guru mapel yang diujikan nasional. Pemerintah harus memperhatikan rasio siswa SMP/MTs per kelas baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas maka pemerintah daerah harus mewujudkan tercapainya rasio standar nasional 32:1, sedangkan dari segi kualitas pemerintah harus memperhatikan perbaikan untuk ruang-ruang kelas yang rusak dan terpenuhinya fasilitas ruang Laboratorium Bahasa dan Laboratorium IPA di masing-masing sekolah sehingga angka lulusan SMP/MTs dapat ditingkatkan. Pemerintah harus mengupayakan pendidikan murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat tidak mampu dalam bentuk kompensasi bantuan sesuai tingkat kemampuan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad, Afridian Wirahadi. 2010. Dampak desentralisasi fiskal terhadap outcomes bidang kesehatan: studi empiris di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. *SNA XIII Universitas Jenderal Soedirman*.

-
- Akpan, Eme O. 2011. Fiscal decentralization and social outcomes in Nigeria. *European Journal of Business and Management*. 3
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Teknik analisis data*. Jakarta : Badan Penelitian & Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan.
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 2007. *Profil pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2007*. Semarang : Dinas Provinsi Jawa Tengah.
- _____. 2008. *Profil pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2008*. Semarang : Dinas Provinsi Jawa Tengah.
- _____. 2009. *Profil pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2009*. Semarang : Dinas Provinsi Jawa Tengah.
- _____. 2010. *Profil pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2010*. Semarang : Dinas Provinsi Jawa Tengah.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara online dengan alamat website: www.djpk.depkeu.go.id
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2009. *Basic econometrics*. McGraw-Hill International Edition.
- Ghozali, Imam. 2011. *Model persamaan struktural konsep dan aplikasi dengan program amos 19.0*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Rencana strategis (renstra) kementerian pendidikan nasional tahun 2010-2014*. Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional.
- Lou, Wei-qing dan Shi Chen. 2010. Fiscal decentralization and public education provision in China. *Canadian Social Science*. 6 (4): 28-41.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*. Edisi IV. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- _____. 2007. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Oates, Warren E. 1993. Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*. 46 (2): 237-243.
- Robalino, D. A, O. F. Picazo, dan A. Voetberg. 2001. Does fiscal decentralization improve health outcome ? Evidence from a cross-country analysis. *World Bank Country Economics Department Series 2565*.
- Rubio, Dolores Jimenez. 2010. Is fiscal decentralization good for your health? Evidence from a panel of OECD Countries. *HEDG*. 10 (30).
- Salinas, Paula. 2007. Evaluation of the effects of decentralization on educational outcomes in Spain. @ub.edu ; Bcelona.

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Economic development*. Ninth Edition. United Kingdom : Pearson Education Limited.

Uchimura, Hiroko dan Johannes Jutting. 2009. Fiscal decentralization, chinese style: good for health outcomes. *World Development*. 37 (12):1924-1936.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik